Melihat Tiongkok dalam Pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)[1]

Luerdi

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Riau

1.Pendahuluan

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.[2]

ACFTA merupakan pasar terbesar ketika di dunia setelah Uni Eropa dan NAFTA *(North America Free Trade Area)*.[3] Perdagangan bebas antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN ini meliputi sektor barang, jasa, dan investasi. Pembicaraan awal ACFTA dimulai dengan penandatanganan *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 06 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Kemudian diikuti dengan penandatangan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* pada Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan pertama *Framework Agreement* ditandatangani pada

---

[1] Bahan diskusi perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Riau (2013-2014).

[2]ASEAN-China Free Trade Area., http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf, diakses tanggal 08 Juni 2014.

[3] Emre Tunç Sakaoğlu ., China-ASEAN Free Trade Agreement: An overview (07 March 2014)., 2014 http://www.turkishweekly.net/op-ed/3164/china-asean-free-trade-agreement-an-overview.html, diakses tanggal 08 Juni 2014.

tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.[4]

Trade in Goods Agreement (persetujuan perdagangan barang ACFTA) ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. *Trade in Services* (persetujuan perdagangan jasa ACFTA) ditandangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina pada bulan Januari 2007. Sedangkan persetujuan investasi ACFTA ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.[5] Secara resmi ACFTA mulai berlaku pada Januari 2010 antara Tiongkok dengan ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan untuk 4 negara ASEAN lainnya (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) mulai berlaku pada 2015 mendatang.[6]

Secara umum, pembentukan ACFTA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan ekonomi negara-negara peserta. Adapun tujuan yang telah dipahami bersama dalam ACFTA adalah: 1) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota, 2) meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi, 3) menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. 4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.[7]

II. Pendekatan Teoritis

---

[4] ASEAN-China Free Trade Area., *Op.Cit.,*
[5] *Ibid.,*
[6] Emre Tunç Sakaoğlu., *Op.Cit.,*
[7]ASEAN-China Free Trade Area., *Op.Cit.,*

Untuk menjelaskan mengapa hubungan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN (ACFTA) dapat terjadi, pendekatan liberalisme ekonomi dapat digunakan. Liberalisme ekonomi digagas oleh Adam Smith dan David Ricardo. Smith memiliki pemikiran bahwa halangan-halangan perdagangan yang diberlakukan oleh negara hanya akan membuat negara tersebut miskin ketimbang kaya.[8] Intervensi negara terhadap perdagangan internasional hanya akan menyulitkan perkembangan ekonominya. Negara lebih baik menyerahkan perdagangan pada mekanisme pasar. Namun peran negara dibutuhkan untuk menciptakan perdagangan bebas.

Negara-negara dapat memperoleh *economies of scale* dengan melakukan spesialisasi pada barang-barang yang mereka hasilkan dengan lebih efisien.[9] *Economies of scale* merupakan pengurangan-pengurangan pada unit biaya untuk meningkatkan produksi. Negara-negara selayaknya mengejar terwujudnya *economies of scale* agar dapat bersaing dengan negara lain. Pasar dapat menghasilkan kesejahteraan atau kemakmuran karena adanya kompetisi dalam menyediakan barang-barang yang bervariasi dengan harga murah. Sebaliknya peran pemerintah negara hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan keamanan nasional dan *public goods* seperti sekolah-sekolah, jalan-jalan dan lain sebagainya.[10]

Teori liberalisasi ekonomi erat hubungannya dengan teori keuntungan komparatif *(comparative advantage).* Teori ini dikemukan oleh David Ricardo. David Ricardo mengatakan bahwa kalaupun suatu negara mampu menghasilkan semua barang dengan lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain, negara tersebut akan lebih baik dengan melakukan spesialisasi terhadap barang tertentu yang dapat dihasilkan dengan paling

---

[8] Richard W. Mansbach and Kirsten L. Rafferty., 2008, *Introduction to Global Politics*, London, Routledge, hal. 508.
[9] *Ibid.,*
[10] *Ibid.,*

efisien secara relatif ketimbang negara-negara *partner* perdagangannya.[11] Secara sederhana keuntungan komparatif merupakan kemampuan untuk menghasilkan suatu barang pada harga yang lebih rendah, relatif terhadap barang-barang lain, dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dengan melihat penjelasan pendekatan teoritis diatas dapat dipahami mengapa Tiongkok menyampaikan inisiatif kepada negara-negara ASEAN untuk mewujudkan perdagangan bebas antara kedua belah pihak sampai pada komitmen Tiongkok membantu negara-negara ASEAN mempersiapkan diri menghadapi ACFTA. Tiongkok menyadari perlunya untuk memperluas jangkauan keuntungan ekonomi bagi penduduknya dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Kesejahteraan penduduk domestik Tiongkok dapat ditingkatkan bila produk-produk Tiongkok dapat menembus pasar kawasan Asia Tenggara dengan lebih lancar tanpa adanya hambatan tarif ataupun hambatan non-tarif.

Berkurangnya atau dihapusnya hambatan-hambatan tarif dan non-tarif juga memberikan ruang pada arus modal dari Tiongkok untuk melakukan investasi di negara-negara ASEAN. Keunggulan industri domestik Tiongkok dalam menghasilkan barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif juga menjadi alasan kuat bagi Tiongkok untuk mendorong terwujudnya ACFTA. Dengan jumlah penduduk yang besar, industri domestik Tiongkok dapat berkembang dengan pesat dan menghasilkan variasi barang-barang dengan harga yang reatif lebih murah. Barang-barang yang relatif lebih murah menjadi pilihan bagi penduduk ASEAN mengingat sebagian besar penduduk ASEAN adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Kesadaran akan pentingnya perdagangan bebas tidak hanya dimiliki oleh Tiongkok tapi juga negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN juga berkeinginan produk-produk domestik mereka mampu menembus pasar Tiongkok yang penduduknya jauh lebih banyak ketimbang jumlah penduduk

---

[11] *Ibid.,* hal.509.

kawasan Asia Tenggara. Walaupun inisiatif ACFTA datang dari Tiongkok, negara-negara ASEAN juga memiliki kemampuan untuk memaksimalkan produksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif, salah satunya adalah produk pertanian.

III. Tiongkok dalam ACFTA

III.1. Kekuatan Ekonomi Tiongkok

Di awal-awal tahun 1990-an, Tiongkok mulai membuka diri dari isolasi internasional dan mulai mengembangkan *partnership* dengan berbagai dunia luar khususnya dengan kawasan Asia Tenggara.[12] Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok telah membawa perubahan yang besar yaitu pertumbuhan industrialisasi yang cepat di Tiongkok. Dalam beberapa tahun perjalanannya, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan dan kekuatan ekonomi Tiongkok mulai diperhitungkan oleh negara-negara lain.

Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok didukung oleh jumlah penduduk yang besar sebagai modal sosial untuk menggerakkan berbagai industri di dalam negeri Tiongkok. Industri-industri di Tiongkok mampu menghasilkan produk-produk dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif lebih sedikit. Keunggulan Tiongkok dalam menghasilkan produk-produk yang lebih banyak dan lebih murah memudahkan hasil industrinya menembus pasar dan bersaing di negara-negara lain. Tiongkok sangat bergantung pada perdagangan dengan negara lain karena produk-produk industri Tiongkok umumnya memiliki keunggulan komparatif *(comparative advantage)* dibandingkan dengan negara-negara lain. Keunggulan komparatif produk-produk Tiongkok memungkinkan Tiongkok memperoleh surplus ekonomi dengan memaksimalkan ekspor ke negara-negara lain.

---

[12]Richard Javad Heydarian., *ASEAN unity and the threat of Chinese expansion (26 May 2014)*, diakses http://www.aljazeera.com/indepth/opinion, 12 Juni 2014.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang cepat dan signifikan mampu menarik perhatian negara-negara lain khususnya negara-negara berkembang yang ada di kawasan Asia Tenggara. Walau persentase tingkat pertumbuhan tahunan *gross domestic product* (GDP) Tiongkok tidak selalu melebihi persentase tingkat pertumbuhan GDP tahun-tahun sebelumnya, persentase pertumbuhan GDP Tiongkok tetap dianggap luar biasa. World Bank mencatat persentase tingkat pertumbuhan tahunan GDP Tiongkok sebagai berikut (sebelum kesepakatan ACFTA tahun 2010):[13]

Table: China's Annual GDP Growth

Y	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*
AG (+)	*8.4*	*8.3*	*9.1*	*10.0*	*10.1*	*11.3*	*12.7*	*14.2*	*9.6*

Y: Year, AG: Annual Growth in %
Source: World Bank data

Tiongkok kemudian dianggap sebagai *partner* dagang yang dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara Asia Tenggara. Jumlah penduduk Tiongkok yang besar juga menjadi pertimbangan pasar potensial bagi negara-negara Asia Tenggara. Keinginan Tiongkok untuk menjalin hubungan ekonomi dengan Asia Tenggara telah nampak pada pertengahan 1990-an dimana Tiongkok mulai melakukan pembicaraan-pembicaraan untuk mengintensifkan hubungan dagang dengan negara-negara ASEAN yang mengarah pada perdagangan bebas.

Selain pertumbuhan ekonomi domestik yang dimilki Tiongkok yang ditandai dengan *Gross Domestic Product* (GDP) yang selalu meningkat, keinginan Tiongkok untuk memberikan bantuan-bantuan ekonomi dengan

---

[13] *GDP growth (annual %)*, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1, pada 14 Juni 2014.

syarat-syarat yang lebih mudah dan melakukan investasi di kawasan Asia Tenggara semakin meyakinkan negara-negara ASEAN bahwa Tiongkok dapat menjadi mitra dalam meningkatkan kesejahteraan masyakat negara-negara ASEAN. Selain itu Tiongkok juga diyakini sebagai kekuatan ekonomi yang mampu menandingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia-Pasifik, bahkan kayakinan semacam ini telah muncul sebelum dimulainya *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* pada 2010. Negara-negara ASEAN mencoba untuk mengambil peluang dengan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dalam tatanan ekonomi dunia.

III.2. Motivasi Tiongkok dalam pembentukan ACFTA

Motivasi Tiongkok dalam pembentukan ACFTA tidak hanya didorong oleh keinginan Tiongkok meningkatkan kesejahteraan penduduknya, tapi juga sebagai upaya menyaingi kekuatan ekonomi dan politik Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. ACFTA dapat menjadi pembuktian bagi Tiongkok akan kekuatan ekonomi dan politiknya dalam mempengaruhi dinamika ASEAN secara signifikan dimasa yang akan datang. Baik Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai halaman belakang *(backyard)* kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Tiongkok memiliki motivasi politik dan ekonomi dalam ACFTA. Secara politik, Tiongkok tetap ingin menjadi teman yang baik bagi tentangganya yaitu front Asia Tenggara. Sebelum pembentukan ACFTA, Tiongkok berupaya meyakinkan negara-negara ASEAN bahwa Tiongkok bukanlah sebuah ancaman bagi kawasan Asia Tenggara dengan menjalin kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Tiongkok bersedia untuk membuka akses bagi negara-negara ASEAN untuk memasuki pasar domestik Tiongkok yang sedang berkembang pesat.[14]

[14] Chia Siow Yue., *ASEAN-China Free Trade Area*, Paper for presentation at the AEP Conference Hong Kong, 12-13 April 2004, hal. 14.

Secara ekonomi, Tiongkok membidik sumber daya alam yang ada di kawasan Asia Tenggara khususnya minyak. Tiongkok membutuhkan pasokan minyak untuk menggerakkan industri domestiknya. Selain itu, Tiongkok juga menyadari bahwa kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk sekitar 560 juta sebagai pasar potensial bagi distribusi ptoduk-produk industri Tiongkok.[15] Hubungan ekonomi yang lebih kuat antara Tiongkok dan ASEAN akan membatasi kekuatan Amerika Serikat dikawasan Asia Tenggara karena negara-negara ASEAN memiliki pilihan lain selain Amerika Serikat yaitu Tiongkok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Terlepas adanya motivasi ekonomi dan politik yang dimiliki Tiongkok, usulan Tiongkok untuk membentuk perdagangan bebas antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN disambut dengan baik oleh pemerintah negara-negara tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah negara-negara ASEAN bersedia membentuk kerjasama perdagangan bebas dengan Tiongkok. Pertama, Tiongkok adalah negara dengan kekuatan ekonomi besar dan dinamis dan permintaan *(demand)* Tiongkok yang sedang tumbuh terhadap barang dan jasa ASEAN dapat menjadi mesin percepatan pertumbuhan ekonomi ASEAN.[16] Melihat realitas ini, negara-negara ASEAN menyambut keinginan Tiongkok untuk melakukan kerjasama ekonomi yang intensif berupa ACFTA.

Semakin membaiknya perekonomian domestik Tiongkok, semakin meningkatkan kemampuan warga Tiongkok untuk berpergian keluar negeri khususnya untuk tujuan wisata. Kunjungan para turis asal Tiongkok menjadi hal penting dalam pertumbuhan industri pariwisata di kawasan ASEAN. Selain itu, negara-negara ASEAN membutuhkan investasi dari Tiongkok yang dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk negara-negara ASEAN. Hubungan

---

[15] *Ibid.,*
[16] *Ibid.,*

ASEAN-Tiongkok yang semakin erat dapat mengurangi ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap Amerika, Eropa, dan Jepang.[17]

Kedua, Tiongkok menawarkan perlakuan khusus dan bantuan pada kelompok negara-negara CLMV dan bersedia memperluas atau berbagi manfa'at keanggotaannya di WTO bagi anggota ASEAN non-WTO.[18] Keanggotaan Tiongkok di WTO dianggap dapat memberikan keuntungan kepada mitra dagang Tiongkok yang tidak menjadi anggota WTO. CLMV di Asia Tenggara belum masuk dalam keanggotaan WTO, tapi dapat menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok dengan menerapkan prinsip-prinsip perdagangan bebas pada tahun 2015.

Ketiga, Kerjasama ekonomi ASEAN-Tiongkok lebih nyata untuk menciptakan perdangan bebas untuk produk-produk pertanian ketimbang upaya memasukkan produk-produk pertanian dalam daftar produk perdagangan bebas WTO yang sering ditolak oleh negara-negara maju.[19] Produk pertanian menjadi produk andalan negara-negara berkembang di ASEAN dan Tiongkok bersedia membuka pasarnya bagi distribusi produk-produk tersebut.

III.3. Strategi Tiongkok dalam Pembentukan dan Menghadapi ACFTA

Walau Tiongkok adalah negara besar dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya, Tiongkok tetap memerlukan stategi yang baik agar kepentingan nasionalnya melalui kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN dapat tercapai. Dalam politik internasional, diplomasi masih menjadi pilihan utama suatu negara dalam mempengaruhi negara lain dalam membuat suatu kesepakatan bersama, apalagi bila kesepakatan tersebut sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

---

[17] *Ibid.,*
[18] *Ibid.,*
[19] *Ibid.,*

Kemajuan dalam bidang ekonomi yang dialami oleh Tiongkok dan jumlah penduduk Tiongkok yang besar menjadi modal penting dalam meyakinkan negara-negara ASEAN untuk mengadakan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Tiongkok berupaya mengedepankan diplomasi yang bersahabat tanpa harus memaksa negara-negara ASEAN untuk membentuk kesepakatan perdagangan bebas dalam waktu yang singkat. Tiongkok sepakat untuk memberlakukan perdagangan bebas ACFTA dimulai dengan pengurangan tarif produk dan investasi secara bertahap.

Selain karena tingkat kekuatan ekonomi negara-negara ASEAN yang bervariasi, negara-negara ASEAN tidak akan mampu menghadapi ACFTA tanpa adanya persiapan domestik. Sehingga ACFTA yang diusulkan oleh Tiongkok pada awal 2000-an baru dapat diberlakukan pada awal 2010 antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang perekonomiannya lebih baik (ASEAN 6) dan awal 2015 antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang perekonomiannya masih rendah (CLMV). Selain itu, Tiongkok sepakat untuk meninjau kembali poin-poin kesepakatan dalam perjanjian ACFTA bila dalam perjalanannya negara-negara ASEAN merasa dirugikan. Tiongkok bersedia memberikan bantuan ekonomi pada negara-negara ASEAN untuk mempersiapkan diri menghadapi ACFTA.

Dalam penyelesaian sengketa gugusan pulau di Laut Tiongkok Selatan diawal-awal pembicaraan ACFTA, Tiongkok bersedia untuk mengedepankan cara-cara damai dalam membicarakan masalah tersebut dengan negara-negara ASEAN yang memiliki konflik dengan Tiongkok.[20] Keinginan politik Tiongkok tersebut memperkuat power ekonomi dan diplomasi Tiongkok dalam meyakinkan negara-negara ASEAN untuk menyepakati perdagangan bebas dan sama-sama menjadikan Tiongkok dan Asia Tenggara sebagai kawasan yang lebih sejahtera.

[20] Richard Javad Heydarian., *Op.Cit.*,

Dalam tataran domestik Tiongkok memilki beberapa strategi dalam menghadapi ACFTA. Dalam hal teknis, Tiongkok telah mempersiapkan diri dengan melakukan berbagai reformasi kebijakan sehingga mampu unggul di faktor sistem birokrasi, infrastruktur, stabilitas ekonomi, inovasi bisnis, efisiensi tenaga kerja dan ukuran pasar dan kemudian mampu mencapai *economies of scale*.[21] Tiongkok lebih gesit mempersiapkan diri ketimbang negara-negara ASEAN dalam menghadapi ACFTA.

Tiongkok menerapkan strategi *Reverse Engineering* atau imitasi sehingga mengurangi biaya riset dan pengembangan, serta dapat memproduksi barang yang bervariasi dalam waktu singkat. Pemerintah Tiongkok memberlakukan *tax free policy* (kebijakan bebas pajak) selama tiga tahun pertama untuk perusahaan *joint venture*.[22] Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Tiongkok tumbuh dan berkembang dengan cepat. Adanya subsidi sebesar 13,5% dari pemerintahan lokal dalam bentuk *tax refund*, pinjaman bank yang hanya sebesar 3% per tahun, serta banyaknya industri pendukung memungkinkan berbagai industri di Tiongkok tidak perlu mengimpor barang.[23] Keberadaan industri-industri pendukung di Tiongkok mampu mengurangi jumlah impor Tiongkok dari luar karena kebutuhan-kebutuhan akan barang-barang tertentu sudah dapat di penuhi oleh industri domestiknya. Selain itu, mata uang yuan dipatok terhadap US$ membuat harga ekspor barang Tiongkok menjadi sangat murah.[24]

Pemerintah Tiongkok memberikan perhatian dalam sektor pendidikannya. Pemerintah Tiongkok giat mendorong investasi yang luar biasa di sektor pendidikan sejak membuka diri dari politik isolasi komunisme. Tercatat 3,4 juta pelajar masuk ke universitas pada tahun 1998 dan empat tahun kemudian, jumlah pendaftaran mahasiswa ke universitas naik sebesar

[21] Daniel Hadinata Saputro., *Strategi Menghadapi ACFTA (12 Februari 2010)*, diakses http://swa.co.id/my-article/strategi-menghadapi-acfta, tanggal 13 Juni 2014.
[22] *Ibid.*,
[23] *Ibid.*,
[24] *Ibid.*,

165% dan mahasiswa Tiongkok yang belajar ke luar negeri naik sebesar 152%.[25] Pemerintah Tiongkok mengupayakan agar lulusan sarjananya di luar negeri kembali ke Tiongkok untuk membangun negeri tersebut. Pada awalnya pabrik-pabrik di Tiongkok hanya menjadi pabrik alih daya, namun karena SDM-nya sudah menguasi teknologi, kemudian tak mengherankan perusahaan Tiongkok seperti Lenovo bisa membeli IBM Thinkpad, Huawei mengancam Cisco dan Ericsson, serta Haier mengejar GE, Whirlpool dan Maytag.[26]

Dalam hal tenaga kerja atau buruh, Tiongkok memiliki keunggulan efisiensi. Upah tenaga kerja di Tiongkok hampir sama dengan negara-negara berkembang lainnya, namun buruh Tiongkok bekerja lebih efisien khususnya dibandingkan negara-negara ASEAN. Produktivitas pekerja Tiongkok naik 6% per tahun (1978-2003).[27] Satu produk butuh seorang pekerja di Tiongkok, sedangkan di negara lain seperti Indonesia, butuh tiga orang pekerja. Dengan kenyataan seperti itu, pabrik-pabrik di Tiongkok mampu menghasilkan jumlah barang yang lebih banyak dan kemudian diekspor ke luar negara tersebut.

IV. Kesimpulan

Keinginan untuk menjadikan kawasan China dan Asia Tenggara agar lebih sejahtera telah mendorong terbentuknya kerjasama ekonomi berupa *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).* Kedua pihak merupakan pasar potensial bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing. Selain itu, kekuatan ekonomi Tiongkok yang sedang berkembang pesat menjadi daya tarik bagi negara-negara ASEAN untuk menjalin kerjasama ekonomi. Bentuk kerjasama ini adalah liberalisasi pasar atau perdagangan bebas agar produk-produk industri Tiongkok dan negara-negara ASEAN dapat saling memasuki pasar dengan lebih mudah dan lebih lancar. ACFTA tidak hanya menyangkut perdagangan barang, tapi juga perdagangan jasa dan pergerakan investasi.

---

[25] *Ibid.,*
[26] *Ibid.,*
[27] *Ibid.,*

Tiongkok memiliki keunggulan dalam produk-produk industrinya karena sebagian besar produk tersebut memiliki keuntungan komparatif bila dibandingkan dengan produk-produk industri negara-negara ASEAN. Bagi Tiongkok kawasan Asia Tenggara adalah pasar untuk memperoleh surplus perdagangan yang memberikan dampak positif pada perkembangan ekonominya. Selain alasan ekonomi, sebenarnya Tiongkok juga memililki alasan politik dalam pembentukan ACFTA ini, yaitu membendung dan menyaingi Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik.

Bagi negara-negara ASEAN, ACFTA merupakan peluang untuk mendatangkan para investor untuk melakukan investasi di negara-negara tersebut, tidak hanya mengekspor produk-produk industrinya ke Tiongkok. Investasi yang datang dari Tiongkok dapat mendorong perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN dan membuka lapangan kerja. Bagi negara-negara CLMV, ACFTA dapat menjadi pekuang untuk mengejar ketertinggalan perkembangan ekonomi mereka dan mengurangi jurang kekuatan ekonomi mereka terhadap ASEAN 6.

Referensi

ASEAN-China Free Trade Area., http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum /Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf, diakses tanggal 08 Juni 2014

Sakaoğlu, Emre Tunç., *China-ASEAN Free Trade Agreement: An overview* (07 March 2014)., 2014 http://www.turkishweekly.net/op-ed/3164/china-asean-free-trade-agreement-an-overview.html, diakses tanggal 08 Juni 2014.

Mansbach, Richard W. and Kirsten L. Rafferty., 2008, *Introduction to Global Politics*, London, Routledge.

Heydarian, Richard Javad., *ASEAN unity and the threat of Chinese expansion (26 May 2014)*, diakses http://www.aljazeera.com/indepth/opinion, 12 Juni 2014.

Yue, Chia Siow., *ASEAN-China Free Trade Area, Paper for presentation at the AEP Conference, Hong Kong*, 12-13 April 2004.

Saputro, Daniel Hadinata., *Strategi Menghadapi ACFTA (12 Februari 2010)*, diakses http://swa.co.id/my-article/strategi-menghadapi-acfta, tanggal 13 Juni 2014.

GDP growth (annual %), diakses http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. MKTP. KD.ZG? page=1, tanggal 14 Juni 2014.